

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Sebelah Utara Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 Hektar (Ha) atau sekitar 25,04% dari luas pulau jawa (1,70% luas Indonesia). Ibukota Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten, 6 Kota, 565 Kecamatan, 764 Kelurahan dan 7804 desa. Luasnya wilayahnya 32.548 km², terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80%) merupakan lahan sawah, dan 2,25 juta hektar (69,20%) merupakan bukan lahan sawah. Kabupaten Cilacap dengan luas 2.128,51 Ha (sekitar 6,57% dari total luas di Provinsi Jawa Tengah) merupakan daerah yang terluas di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Magelang dengan luas 1.812 Ha merupakan wilayah paling kecil di Provinsi Jawa Tengah.

Letak geografis Provinsi Jawa Tengah sangat strategis, karena merupakan jalur darat antara Jawa Timur dengan Jawa Barat dan DKI

Jakarta yang perkembangannya sangat pesat. Hal tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Provinsi Jawa Tengah. Kondisi strategis ini bisa dimanfaatkan guna perkembangan Jawa Tengah yang akan berdampak pada pembangunan nasional.

B. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja

Bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam usaha memajukan pertumbuhan ekonomi daerah. Penyerapan tenaga kerja dapat terjadi di setiap sektor usaha yang ada, namun sektor memberikan kontribusi yang besar berbeda-beda setiap daerahnya dalam melakukan penyerapan tenaga kerja.

Pada Februari 2015, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan perbaikan di tengah kinerja ekonomi yang belum optimal. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan penduduk angkatan kerja yang bekerja menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah yang kian membaik, sementara jumlah pengangguran relatif tetap. Pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja meningkat pesat sebesar 3,40% (yoy) menjadi 17,32 juta orang. Peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan peningkatan pada jumlah angkatan kerja sebesar 3,21% (yoy) menjadi 18,29 juta orang. Dibandingkan dengan angka nasional, Jawa Tengah mampu menyumbang 14,33% (yoy) penduduk bekerja dari keseluruhan angka penduduk bekerja secara nasional.

Tabel 4.1
 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
 Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Jutaan Orang) Tahun 2014-2015

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015
	Februari	Agustus	Februari
Pertanian	5,19	5,17	5,39
Industri	3,31	3,17	3,33
Perdagangan	3,72	3,72	4,01
Jasa	2,15	2,19	2,28
Lainnya	2,38	2,30	2,31
Total	16,75	16,55	17,32

Sumber: BPS Jawa Tengah

Pada Februari baik 2014 maupun 2015, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah masing-masing sebesar 5,19 dan 5,39 juta orang (31,12 % dari total penduduk bekerja di Jawa Tengah Februari 2015). Sektor perdagangan berada diposisi kedua setelah sektor pertanian dengan menyerap 4,01 juta orang (23,15% penduduk yang bekerja di Jawa Tengah) pada Februari 2015. Sektor tersebut mengalami laju peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tumbuh positif sebesar 2,92% (yoy) di triwulan I 2015.

C. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 561.4/58 Tahun 2012. Pada tahun 2013, UMK tertinggi di Kota Semarang yaitu

1.209.100, sedangkan yang terendah di Kabupaten Cilacap Wilayah Barat yaitu sebesar 816.000. UMK di Jawa Tengah tahun 2012 rata-rata naik sebesar 9,55% atau sekitar Rp 80.020.

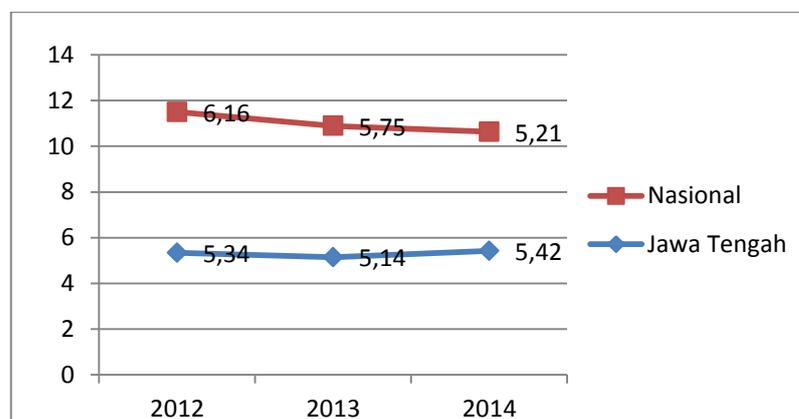
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/60 Tahun 2013. Berdasarkan data, UMK tertinggi di Kota Semarang yaitu Rp 1423.000, sedangkan UMK yang terendah di Kabupaten Semarang yaitu Rp 910.000. UMK pada tahun 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 16,66% di bandingkan pada tahun sebelumnya. Terdapat 23 Kabupaten/Kota yang telah mencapai 100% KHL. Rata-rata pencapaian pah minimum terhadap KHL tersebut sebesar 98,86% yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 97,30%.

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah pada tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 560/85 Tahun 2014. Pada tahun 2015, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp 1.685.000, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Cilacap Wilayah Barat dan Kabupaten Banyumas yaitu Rp 1,100.000. Besaran UMK terendah tidak lagi di Kabupaten Purworejo yang sebesar Rp 910.000 di tahun 2014. UMK tahun 2015 naik sebesar 14,96% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014. Rata-rata UMK tersebut naik sebesar Rp 157.929. Terdapat 31 Kabupaten/Kota yang sudah 100% KHL, akan tetapi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang belum

sampai 100% KHL termasuk Cilacap yang terbagi menjadi wilayah Kota, Timur dan Barat.

D. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan gejolak ekonomi global serta terbukanya pasar bebas Asia Pasifik berdampak pada persaingan antar produk yang sangat tinggi. Keadaan ini berakibat pada penurunan permintaan global, nilai ekspor serta laju pertumbuhan ekonomi yang melambat.



Sumber: BPS Jawa Tengah 2012-2014, diolah

Gambar 4.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010

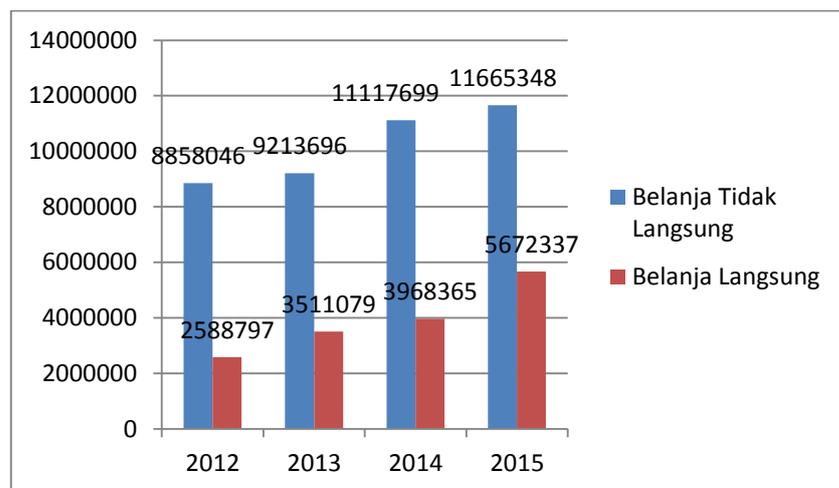
Pada tahun 2012-2015, kinerja pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah cenderung mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2014 kembali meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2012-2014 tersebut sebesar 5,3 persen lebih rendah di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,90 persen. PDRB Jawa Tengah yang rendah menempati urutan ke tiga setelah Yogyakarta dan Banten.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tergolong relatif baik dan stabil di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi lain di Pulau Jawa. Terdapat tiga Provinsi dari keenam provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2012 yang mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,23 persen yaitu Provinsi Jawa Timur 7,27 persen, DKI Jakarta 6,53% dan Jawa Tengah 6,34%.

E. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah

Menurut Bailey (1995; 43), perkembangan pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua yaitu teori makro dan teori mikro. Teori makro dalam perkembangan pengeluaran pemerintah menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran, sedangkan teori mikro menjelaskan perubahan secara *particular* komponen-komponen pengeluaran pemerintah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah di Jawa Tengah periode tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah realisasi belanja pemerintah daerah Jawa Tengah yang selalu meningkat baik jumlah belanja langsung maupun belanja tidak langsung.



Gambar 4.2
Perkembangan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015

Anggaran belanja pada APBD 2015 masih di dominasi oleh belanja tidak langsung sebesar 67,28%, sedangkan belanja langsung sebesar 32,72%. Anggaran belanja yang sudah terserap sebesar 13,88% dari anggaran atau senilai Rp 2,41 triliun pada triwulan I 2015 meningkat dibandingkan realisasi I 2014 yang sebesar 11,44% (1,84 triliun). Peningkatan realisasi tersebut terjadi baik belanja langsung maupun tidak langsung.

Tabel 4.2
Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2014 dan 2015

BELANJA	I-2014	I-2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12,62%	15,47%
Belanja Pegawai	15,78%	18,83%
Belanja Hibah	22,06%	30,82%
Belanja Bantuan Sosial	0,18%	0,00%
Belanja Bagi Hasil KPD. Kab/Kota	13,47%	10,15%
Belanja Bant.Keu. KPD. Kab/Kota	0,05%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	1,12%	30,31%
BELANJA LANGSUNG	8,47%	10,62%
Belanja Pegawai	14,93%	19,29%
Belanja Barang dan Jasa	9,84%	17,02%
Belanja Modal	5,06%	3,16%
JUMLAH BELANJA	11,44%	13,88%

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah

Pencapaian realisasi belanja tidak langsung di triwulan ini lebih baik dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pada triwulan I tahun 2015, anggaran yang terserap sebesar 15,47% dari rencana belanja tidak langsung atau lebih besar dari tahun sebelumnya (triwulan I tahun 2014) yang sebesar 12,62%. Sementara itu penyerapan anggaran pada belanja langsung pada triwulan I tahun 2015 sebesar 10,62% lebih tinggi dibandingkan triwulan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,47%.

Belanja pada tahun ini, tahun 2015 sebagian besar di anggarkan untuk Proyek Bina Marga. Pencapaian realisasi infrastruktur Bina Marga tersebut berkisar 30% berdasarkan hasil *liaison*. Namun pembayaran akan dilakukan

setelah proyek tersebut selesai, sehingga pencapaian realisasi keuangan tercatat lebih rendah. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.